

ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA UNTUK MENGETAHUI KINERJA KEUANGAN PADA KANTOR DESA PATTALASSANG KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

Verawati¹, Johanis Padang², Fauziah³
STIM-LPI Makassar, Program Studi Manajemen
verawatimhd@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengelolaan Alokasi Dana Desa berdasarkan Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Pertumbuhan dan Rasio Ekonomis. Objek penelitian ini yaitu Desa Pattalassang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Jenis penelitian yang di gunakan adalah jenis penelitian kuantitatif karena data yang di kumpulkan dalam bentuk angka-angka dari laporan keuangan Laporan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2020-2022. Sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Analisis data menggunakan analisis rasio keuangan yang terdiri dari rasio efektivitas, rasio pertumbuhan, rasio efisiensi, dan rasio ekonomis. Hasil menunjukkan rasio efektivitas tergolong efektif dengan rata-rata efektivitas senilai 99,97%, rasio pertumbuhan pendapatan Desa rata-rata (-5,57%) rasio pertumbuhan belanja rata-rata (-4,95%) rasio efisiensinya rata-rata senilai 99,28% (Kurang Efisien) rasio ekonomis rata-rata 99,16% (ekonomis). Kinerja Keuangan Desa Pattalassang tahun 2020- 2022 dari aspek efektivitas dalam mencapai target dana Desa sudah efektif, Aspek Pertumbuhan Pendapatan menunjukkan angka pertumbuhan yang negative. Aspek Pertumbuhan Belanja menunjukkan angka pertumbuhan yang negatif. Aspek Efisiensi menunjukkan kinerja desa masih kurang efisien dan, Aspek Ekonomis tergolong ekonomis

Kata Kunci : *Pengelolaan, Kinerja Keuangan, Alokasi Dana Desa*

PENDAHULUAN

Perkembangan setiap Desa dipengaruhi oleh pengelolaan keuangannya. Selain sumber daya manusia yang dapat dipercaya, pengelolaan keuangan desa juga memerlukan sumber daya keuangan yang memadai. Cara desa mengelola uangnya memiliki dampak signifikan pada masa depannya karena menentukan apakah desa dapat tumbuh atau tidak. Kinerja pemerintahan desa akan tercermin dalam pengelolaan keuangan desa. Untuk benar-benar bermanfaat bagi masyarakat setempat, pemerintah desa harus dapat menggunakan uang yang diberikan.

Desa merupakan lembaga pemerintah daerah tingkat terendah yang pada prinsip mempunyai kewenangan untuk melaksanakan tugas pokok dan kegiatan untuk melaksanakan dan mencapai tujuan tertentu. Semua desa wajib melaksanakan kewajiban dan menjalankan kekuasaan yang dilepaskan oleh Pemerintah Kota Seimbang dengan aturan perundang-undangan yang berjalan. Anggaran Desa dapat lebih baik dilaksanakan jika kebijakan desa diikuti, yang merupakan kebutuhan. Suatu bentuk khusus hubungan keuangan ada antara tingkatan pemerintahan, khususnya antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa, dan dikenal sebagai dana Desa.

Pemahaman tentang kewenangan pemerintahan desa diperlukan untuk menjalin hubungan yang positif, yang berimplikasi bahwa APBN yang diberikan ke desa seutuhnya diarahkan kepada lembaga pembangunan dan memperkuat desa sebagai salah satu institusi pendorong pertumbuhan ekonomi lokal. dana Desa diberikan kepada kabupaten melalui APBD dan diperoleh dari APBN dengan mengutamakan pertumbuhan dan pemantapan masyarakat desa. UU Desa No 6 Thn 2014 mengamanatkan pembayaran retribusi Desa. Prinsip-prinsip panduan lain untuk pembiayaan desa meliputi pemerataan, mendahulukan kebutuhan, kekuatan Desa, otonomi partisipatif serta sumber daya desa.

Pembayaran Dana Desa Pemerintah pusat menaruh perhatian pada pembangunan desa melalui penyaluran dana desa (ADD). Pemerintah federal atau lokal mengawasi ADD. apabila ADD menyumbangkan paling sedikit 10% dari sisa uang yang diperoleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setelah Dana Alokasi Khusus dipotong. (Pasal 72 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa). Transfer tersebut dilakukan secara bertahap. Bupati menyalurkan penyaluran Dana Desa setelah memperoleh dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pencairannya dari kepala desa melalui kepala Dinas Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Sejalan dengan ekspektasi Tahap I senilai 40%, Tahap II senilai 40%, dan Tahap III senilai 20% pada bulan November. (Perbu Pangkep No.4 Tahun 2019)

Pemerintah menentukan nilai nominal masing-masing dusun sebelum mengalokasikan dana. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa setiap desa menerima nilai yang tidak sama berdasarkan jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, wilayah, dan kesulitan topografi. Untuk meningkatkan keadilan dan memajukan pembangunan desa, hal ini harus dilakukan. Kabupaten Pangkajene dan kepulauan, salah satu daerah otonom di Sulawesi Selatan, mencontohkan gagasan otonomi daerah dengan memberikan bantuan dana kepada masyarakat agar dapat berkembang dan mencapai potensinya secara maksimal. Penyelenggaraan pemerintahan desa harus mengikuti prinsip pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan dilaksanakan secara tertib dan anggaran (Permendagri No. 113 Tahun 2014). Desa Pattalassang merupakan salah satu desa yang menerima bantuan Alokasi Dana Desa (ADD).

Salah satu alasan yang masuk akal perlunya pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu karena prosedur ADD sejalan dengan rencana otonomi daerah yang menempatkan Desa sebagai basis desentralisasi. Karena desa berhubungan langsung dengan masyarakat, maka kewenangan masyarakat menjadi lebih kuat. Masih terdapat beberapa kekurangan ketika dana ini digunakan untuk pembangunan dan peningkatan kapasitas. Kekurangan ini akan menimbulkan permasalahan seperti penyelewengan dana yang berdampak pada penyalahgunaan dana. Hal juga terjadi pada Desa Pattalassang Kabupaten Pangkep. Alokasi dana desa yang terjadi pada

Desa Pattalassang masih belum bisa dikatakan efektif dalam mengelolah Alokasi Dana Desa hal terlihat dari kurangnya kegiatan yang terlihat dikalangan masyarakat. Di sisi lain, masyarakat desa Pattalassang masih belum berpartisipasi dalam kerja sama swadaya. Selain tidak dilibatkannya masyarakat dalam setiap kegiatan desa yang didanai Alokasi Dana Aldeia (ADD), komunikasi yang buruk antara lembaga pengelola ADD dengan masyarakat.

Untuk memastikan apakah dan seberapa baik dana desa dikelola, diperlukan analisis kinerja keuangan. Analisis keuangan ini amat penting sebab bisa membantu mengidentifikasi masalah di desa dan memberikan saran tentang cara meningkatkan kinerja keuangan di masa mendatang juga dapat menetapkan target kinerja keuangan yang ditentukan dan menilai keberhasilan keuangan. Analisis kinerja keuangan terdiri dari membandingkan hasil dari satu periode ke periode lainnya. Dalam hal ini penulis menggunakan Rasio Pertumbuhan, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi dan Rasio Ekonomis di Desa Pattalassang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Perkembangan kinerja keuangan tiga tahun terakhir, 2020-2022 disajikan dengan rasio tersebut.

Tabel 1.
Laporan Keuangan ADD Desa Pattalassang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun 2020-2022.

Tahun	Anggaran Pendapatan ADD	Realisasi Pendapatan ADD	Anggaran Belanja ADD	Realisasi Belanja ADD
2020	1.094.881.000,00	1.094.881.000,00	1.094.881.000,00	1.094.536.000,00
2021	1.096.332.000,00	1.095.634.000,00	1.096.677.000,00	1.069.599.000,00
2022	1.005.983.510,00	1.005.983.510,00	1.032.363.510,00	1.032.273.510,00

Dari Tabel diatas terlihat bahwasanya besaran tahunan anggaran Alokasi Dana Desa dan realisasi Alokasi Dana Desa tidak sama. Pendapatan (ADD) di Desa Pattalassang, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mengalami naik turun selama Tahun 2020 sampai dengan 2022. Berdasarkan uraian diatas Maka Penulis tertarik Mengadakan penelitian tentang “Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Untuk Mengetahui Kinerja Keuangan Pada Kantor Desa Pattalassang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan”.

Rumusan Masalah

Melihat dari landasan permasalahan yang di utarakan di atas maka rumusan masalah yaitu : Bagaimana Pengelolaan Alokasi Dana Desa berdasarkan Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Pertumbuhan dan Rasio Ekonomis pada Desa Pattalassang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2020-2022.

Tujuan Penelitian

untuk mengetahui Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Desa berdasarkan Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Pertumbuhan dan Rasio Ekonomis pada Desa Pattalassang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2020-2022.

Manfaat Penelitian

Manfaat teoritis penelusuran ini diinginkan berupaya memperluas wawasan mengenai analisis kinerja keuangan pengelolaan ADD dengan menggunakan rasio efisiensi, efisiensi, pertumbuhan serta ekonomi pada kantor desa Pattalassang di kabupaten Pangkajenne dan Kepulauan. Selain itu, penelitian ini juga diinginkan bisa menjadi referensi bagi penelitian serupa di masa mendatang. Manfaat praktis yaitu sebagai petunjuk serta informasi kepada

kantor Desa Pattalassang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tentang kinerja keuangan pengelolaan Alokasi Dana Desa di masa depan.

Kinerja Keuangan

Menurut Hery, (2018) Analisis laporan keuangan dijelaskan dalam buku Analisis Kinerja Manajemen sebagai proses memecah laporan keuangan menjadi bagian-bagian komponennya dan mengevaluasinya secara hati-hati agar memiliki pemahaman yang menyeluruh tentang laporan keuangan itu sendiri. Menurut Irham Fahmi (2018) *mengklaim* bahwa analisis kinerja keuangan dilakukan untuk mengetahui layak atau tidaknya pertumbuhan perusahaan dengan menerapkan konsep manajemen keuangan. Kemudian Harahap (2020) mengklaim bahwa pengukuran kinerja dilakukan demi memenuhi tiga maksud (1) Agar membantu meningkatkan kinerja pemerintah. (2) mengalokasikan sumber daya dan membuat keputusan (3) Bertanggung jawab terhadap komunikasi kelembagaan. Pelaksanaan rencana terorganisir dikenal sebagai kinerja. Kinerja perusahaan dapat dikatakan baik apabila realisasinya sesuai dengan rencana. Sebaliknya, jika pencapaian melebihi perkiraan, maka kinerja perusahaan dinilai sangat baik. Namun, jika rencana tersebut tidak memberikan hasil yang diharapkan, kinerja dapat dianggap buruk. Kinerja keuangan diukur dengan indikator keuangan.

Pengelolaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002:123) dalam Kristina (2014) Istilah "Mengelola" mengacu pada proses, metode atau tindakan manajemen. Sebaliknya, "manajemen" dapat diartikan sebagai "pengendalian, pengorganisasian, pengadministrasian dan pelaksanaan". Oleh karena itu, berdasarkan definisi tersebut, manajemen dapat diartikan sebagai suatu proses, cara pengendalian, pengorganisasian, pengurusan, pengurusan dan pengurusan sesuatu. Dalam hal keuangan dan anggaran, manajemen juga diartikan sebagai proses mengendalikan, mengelola, mengatur, mengelola, dan melaksanakan bidang keuangan dan anggaran.

Tujuan pengelolaan yaitu sebagai berikut:

1. Agar dapat pencapaian tujuan organisasi beralaskan visi dan misi.
2. agar merekonsiliasi tujuan-tujuan yang berlawanan. manajemen diperlukan agar memastikan keselarasan di antara para pemangku kepentingan dalam tujuan, sasaran, dan operasi organisasi.
3. Menggapai efektivitas serta efisiensi. Efisiensi dan efektivitas adalah dua metode umum untuk mengukur kinerja organisasi. Jika langkah-langkah pelaksanaan pengelolaan diidentifikasi dengan benar, maka tujuan pengelolaan akan tercapai.

Pengertian Desa

N. Daldjoeni (2011), dalam Rahmat (2022) mengatakan bahwa. "Desa adalah masyarakat pedesaan dan penduduknya adalah agraris". Suatu desa menunjukkan kesatuan antar komponennya meskipun mempunyai keberagaman ciri fisik dan sosial. Desa sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 yaitu Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai wilayah hukum, pemerintahan negara, prakarsa masyarakat, asal usul dan/atau hak adat yang berada pada pemerintahan NKRI.

Alokasi Dana Desa

Faridah (2018) Pemerintah daerah wajib menyalurkan Alokasi Dana Desa (ADD), yaitu uang perimbangan yang bersumber dari APBD untuk desa. Kabupaten menetapkan waktu operasional untuk membantu penyelenggaraan Alokasi Dana Desa, kemudian mengumpulkan kelompok rekan kerja di kecamatan untuk mengawal pengelolaannya, dan terakhir membentuk Tim Pelaksana Desa agar melaksanakan pengelolaan ADD (Permendagri Nomor 133 Tahun 2014) mengenai pengelolaan keuangan desa, ADD ialah biaya perimbangan yang didapat oleh kabupaten/kota dalam perhitungan penghasilan serta wilayah kabupaten/kota sesudah dikurangi biaya alokasi tertentu. ADD adalah biaya perimbangan yang didapat oleh kabupaten/kota setidaknya sedikit 10% sesudah dikurangi biaya alokasi tertentu serta dipisah dengan cara menyeluruh pada tiap-tiap desa guna kebutuhan serta kepentingan masing-masing tiap-tiap desa .

Rasio Keuangan

Rasio keuangan merupakan analisis proyeksi keuangan yang mencocokkan satu akun dengan akun lainnya. Perbandingan tersebut bisa antara proyeksi keuangan dan proyeksi hasil . Analisis keuangan bertujuan untuk mengetahui bagaimana hubungan akun-akun buku besar dan laporan keuangan, baik pada neraca maupun pada laporan laba rugi. Analisis menunjukkan bahwa akun-akun keuangan berhubungan dan dibandingkan dengan akun-akun lain dalam proyeksi keuangan.. rasio ini merupakan salah satu contoh teknik analisis yang dapat memberikan penjelasan atau gambaran mengenai tujuan dan kondisi ataupun letak keuangan negatif suatu perusahaan. (Wiratna, 2021).

Hasil rasio bisa digunakan demi mengevaluasi kinerja keuangan dan menentukan apakah laporan keuangan di suatu daerah positif atau negatif. Rasio keuangan dipakai agar membandingkan laporan keuangan pemerintah daerah mengenai seberapa efektif mereka mengelola sumber daya selama periode anggaran satu tahun.

a. Rasio Efektivitas

Rasio Efektivitas Rahardjo yang dikutip oleh (Ropa, 2016) Pelaporan hasil program sesuai dengan tujuan yang dinyatakan disebut sebagai efektivitas. Hasil dianggap efektif bila sesuai dengan perencanaan, termasuk peraturan yang berlaku. Efektivitas terkait dengan sejauh mana operasi tertentu berhasil di sektor publik, maka inisiatif tertentu dianggap efektif jika memiliki sumber daya yang signifikan untuk menyediakan kebutuhan masyarakat umum yang sebelumnya tidak terpenuhi.

Menurut Saputra (2016), rasio aktivitas menunjukkan kemampuan Pemerintah Desa untuk mengumpulkan dana yang dibutuhkan demi melaksanakan agenda dibandingkan dengan tujuan yang ditetapkan sesuai kemampuan aktual. Rumus Rasio Efektivitas sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Anggaran PAD yang ditetapkan}} \times 100\%$$

Tabel 2.
Kriteria Efektivitas

Kriteria Efektivitas	Persentase
Sangat efektif	Diatas 100%
Efektif	90% - 100%
Cukup efektif	80% - 90%
Kurang efektif	60% - 80%
Tidak efektif	Kurang dari 60%

Sumber : Mohammad Mahsun (2016:) dalam La Ode Abdul Manan (2020)

a. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan menilai seberapa kesanggupan tertentu yang signifikan dari pemerintah daerah dalam meningkatkan serta mempertahankan pencapaian yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya. Setelah diketahui, dimungkinkan agar menggunakannya untuk setiap komponen dari total komponen pendapatan serta pengeluaran, mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapat perhatian.

Menurut Kasmir (2013), rasio pertumbuhan adalah Rasio yang menggambarkan kemampuan organisasi untuk mempertahankan posisi keuangannya terhadap pergolakan ekonomi dan industri. Menurut Mahmudi dalam (Sartika & Pratama, 2019) Rasio pertumbuhan digunakan untuk menentukan apakah pemerintah suatu wilayah mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja secara positif atau negatif selama satu tahun anggaran atau selama satu atau lebih periode anggaran .

Rumus Rasio Pertumbuhan:

$$a. \text{ Rasio Pertumbuhan Pendapatan} = \frac{\text{Realisasi PAD } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi PAD } X_{n-1}} \times 100\%$$

$$b. \text{ Rasio Pertumbuhan Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja PAD } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi Belanja PAD } X_{n-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

X_n = Tahun yang dihitung

X_{n-1} = Tahun sebelumnya

Tingkat Pertumbuhan PAD diukur berdasarkan Kriteria berikut:

Tabel 3.

Kriteria Pertumbuhan PAD

Kriteria	Nilai Rasio
Rendah	0%-25%
Sedang	25%- 50%
Tinggi	50%-100%

Sumber: Sholeh, 2016 dalam Dwi Supriati, (2021)

c. Rasio Efisiensi

Rasio yang membandingkan jumlah uang yang diterima dengan pengeluaran sebenarnya (belanja daerah) disebut dengan rasio efisiensi. Kinerja keuangan pemerintah daerah dalam hal pengumpulan dan pelaksanaan pendapatan. Kinerja keuangan pemerintah daerah dikatakan efisien apabila rasio yang diperoleh kurang dari 1 (satu) atau 100%. Apabila rasio efisiensi keuangan daerah semakin rendah maka kinerja keuangan pemerintah daerah akan semakin tinggi. Oleh karena itu, untuk mengevaluasi efisiensi proses pengumpulan pendapatan, pemerintah daerah harus menghitung dengan cermat seluruh pendapatan yang diterimanya. Halim 2007 dalam Sartika (2019)

Rumus Rasio ini yaitu sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

Tabel 4.
Kriteria Efisiensi

Kriteria	Persentase
Tidak Efisien	Di atas 100%
Kurang Efisien	90% - 100%
Cukup Efisien	80% - 90%
Efisien	60%- 80%
Sangat Efisien	Di bawah 60%

Sumber: *Keppmendagri No.690.900-327, Tahun 1996 dalam (Utomo, 2015)*

d. Rasio Ekonomis

Ekonomis berarti membeli input terbaik dalam kuantitas dan kualitas dengan harga serendah mungkin. Penghematan merupakan hubungan antara bagaimana organisasi sektor publik dapat mengurangi penggunaan sumber daya input, terutama menghindari pemborosan dan inefisiensi. (Pandapotan R, 2021 dalam Sulham 2022)

Mahmudi (2015) rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Ekonomis} = \frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Anggaran Biaya}} \times 100\%$$

Tabel 5.
Kriteria Ekonomis

Kriteria	Persentase
Sangat Ekonomis	Di atas 100%
Ekonomis	90% - 100%
Cukup Ekonomis	80% - 90%
Kurang Ekonomis	60%- 80%
Tidak Ekonomis	Kurang dari 60%

Sumber: *Keppmendagri No.690.900-327, Tahun 1996 dalam (Saragi, 2022)*

Jenis penelitian

Karena informasi di satukan dalam bentuk angka dari laporan ADD dalam APB Desa Pattalassang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, maka digunakan penelitian kuantitatif untuk menganalisis data. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis kinerja keuangan Aloksi Dana Desa pemerintah Desa Pattalassang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Waktu dan Tempat

Penelitian dilaksanakan di kantor Desa Pattalassang, Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkajenne dan kepulauan Sulawesi Selatan. Penelitian ini di lakukan selama dua bulan terhitung bulan Juli hingga Agustus 2023.

Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Mengumpulkan data langsung dari lapangan, atau pengamatan langsung yang dilakukan oleh peneliti untuk melihat fenomena yang terjadi dilapangan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi berarti mengumpulkan data melalui dokumen terkait data yang diverifikasi oleh kantor Desa Pattalassang terkait laporan APB desa. Data laporan APB desa di gunakan untuk menganalisis kinerja keuangan desa.

Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini data akan di analisis menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan melakukan perhitungan Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Ekonomis dan Rasio Pertumbuhan untuk mengetahui kinerja keuangan.

PEMBAHASAN

a. Rasio Efektivitas

Tabel 6.

Rasio Efektivitas Pengelolaan ADD pada Kantor Desa Pattalassang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2022

Tahun	Anggaran ADD (Rp.)	Realisasi ADD (Rp.)	Rasio Efektivitas (%)	Kriteria
2020	1.094.881.000,00	1.094.881.000,00	100%	Efektif
2021	1.096.332.000,00	1.095.634.000,00	99,93%	Efektif
2022	1.005.983.510,00	1.005.983.510,00	100%	Efektif

Sumber : APB Desa Pattalassang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Data diolah 2023.

Laporan Keuangan APB yang bersumber dari ADD pada kantor Desa Pattalassang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memperlihatkan bahwa anggaran ADD mengalami peningkatan serta penurunan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Untuk tahun 2020 Alokasi Dana Desa (ADD) dianggarkan senilai Rp. 1.094.881.000,00. di tahun 2021 ADD naik senilai Rp. 1.096.332.000,00. Kemudian tahun 2022 ADD turun menjadi 1.005.983.510,00.

Terjadi pula kenaikan dan penurunan realisasi (ADD) Kantor Desa Pattalassang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Realisasi alokasi dana desa pada tahun 2020 senilai Rp1.094.881,00. Realisasi Alokasi Dana Desa tahun 2021 mengalami pertumbuhan senilai Rp1.095.643.000,00, sedangkan pada tahun 2022 mengalami penurunan senilai Rp1.005.983.510,00.

Berdasarkan Tabel 5.2 diatas terlihat Rasio Efektivitas kinerja keuangan pada Kantor Desa Pattalassang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan selama kurung waktu 3 tahun yaitu tahun 2020 hingga dengan tahun 2022, pada tahun 2020 Rasio Efektivitas memperoleh nilai 100%, yang berada dalam kategori efektif disebabkan berada pada angka 100%, kemudian untuk tahun 2021 Rasio Efektivitas mengalami sedikit penurunan nilai rasio dengan nilai 99,93%, tetapi masih dikategorikan efektif karena berada diantara 90% hingga 100%, kemudian tahun 2022 terjadi peningkatan sebesar 100% yang berkategori efektif. Dilihat dari uraian serta hasil perhitungan di tabel 5.2 Efektivitas Kinerja Keuangan Desa Pattalassang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sudah termasuk kategori Efektif karena rata-rata Rasio Efektivitasnya sebesar 99,97%.

Rasio efektivitas pada kantor Desa Pattalassang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dari tahun 2020 s/d 2022 mengalami perbedaan nilai rasio . Hal ini terjadi karena perubahan jumlah belanja Desa setiap tahunnya. sebagian besar anggaran dapat direalisasikan secara

efektif menyebabkan peningkatan Rasio Efektivitas dari tahun 2020 ke tahun 2022. Pemerintah Desa Pattalassang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dapat dianggap mempunyai kinerja yang efektif dalam mengelola (ADD) berdasarkan rasio yang meningkat. ini memperlihatkan bahwa kinerja keuangan Kantor Desa Pattalassang Kabupaten Pangkajene dan kepulauan termasuk bagus dalam merealisasikan (ADD) yang telah direncanakan.

Survei yang dilakukan Yuyu Sri Eva pada tahun 2019 di Kabupaten Soppeng menunjukkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) dan Kabupaten Soppeng cukup efektif, dengan rata-rata efektivitas di atas 80% sebesar 82,015%. Di sisi lain, survei kinerja keuangan Penyaluran Dana Desa (ADD) Kantor Desa Pattalassang, Bupati Kepulauan dan Pangkajene dinilai efektif dengan rata-rata efektivitas lebih besar dari 90% atau 99,97%. dibandingkan dengan penelitian ini. Hal ini menunjukkan bahwa Kantor Desa Pattalassang di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mengelola Rasio Efektivitas lebih baik dibandingkan dengan Kantor Desa Pattalassang di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

b. Rasio Efisiensi

Tabel 7.

Rasio Efisiensi Pengelolaan ADD Kantor Desa Pattalassang Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan Tahun Anggaran 2020-2022

Tahun	Realisasi Belanja (Rp.)	Realisasi Pendapatan (Rp.)	Rasio Efisiensi	Kriteria
2020	1.094.536.000,00	1.094.881.000,00	99,96%	Kurang Efisien
2021	1.069.599.000,00	1.095.634.000,00	97,62%	Kurang Efisien
2022	1.032.273.510,00	1.005.983.510,00	102,61%	Tidak Efisien

Sumber: (Diolah 2023)

Realisasi pendapatan Alokasi Dana Desa tahun 2020 sebesar Rp. 1.094.881.000,00, sesuai Laporan Keuangan ADD pada kantor Desa Pattalassang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Realisasi Pendapatan ADD kemudian mengalami sedikit peningkatan sebesar Rp. 1.095.634.000,00 pada tahun 2021, penurunan sebesar Rp. 1.005.983.510,00 pada tahun 2022 untuk Realisasi Pendapatan .

Realisasi anggaran belanja Kantor Desa Pattalassang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk tahun 2020 sebesar Rp. 1.094.536,000,00. Kemudian tahun 2021 mengalami penurunan menjadi Rp. 1.069.599.000,00. dan di tahun 2022 mengalami Kembali penurunan yaitu senilai Rp. 1.032.273.510,00.

Berdasarkan Tabel 5.6 diatas dapat di lihat bahwa Perhitungan Rasio Efisiensi tahun 2020 memperoleh nilai Rasio sebesar 99,96% dengan kategori kurang efisien, karena berada di antara 90%-100% sedangkan untuk tahun 2021 terjadi penurunan sebesar 97,62% yang masih tergolong kurang efisien, karena masih berada diantara 90%-100%, selanjutnya pada tahun 2022 terjadi peningkatan nilai rasio sebesar 102.61% dan tergolong tidak efisien. Rata-rata Rasio Efisiensi Desa Pattalassang selama 3 tahun sebesar 99,96% dapat dikatakan kurang efisien berdasarkan Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan karena masi berada dalam skala 90%-100%.

Perhitungan Rasio Efisiensi dari tahun 2020 s/d 2022 (ADD) Kantor Desa Pattalassang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Kurang Efisien sehingga perlu meningkatkan pendapatan asli desa. Hal ini terjadi dikarenakan biaya yang di keluarkan Desa Pattalassang untuk mendapatkan pendapatan asli desa lebih besar dari biaya yang diperoleh demi mendapatkan pendapatan asli desa yang di terima oleh Desa Pattalassang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Berdasarkan penjelasan perhitungan di atas, rata-rata efisiensi keuangan Desa Pattalassang berada di atas 90% atau sebesar 99,28% menurut Rasio Efisiensi Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Pattalassang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Dapat diasumsikan bahwa Desa Pattalassang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menerima (PAD) yang lebih besar dibandingkan dengan yang dibutuhkan oleh Desa Pattalassang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, sehingga berdampak pada kurang efisiennya keuangan desa. Jika pendapatan awal desa lebih kecil dari biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut, maka keuangan desa dianggap efisien.

c. Rasio Ekonomis

Tabel 8.
Rasio Ekomomis Pengelolaan ADD Kantor Desa Pattalassang Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan Tahun Anggaran 2020-2022

Tahun	Realisasi Belanja	Anggaran Belanja	Rasio Ekinomis	Kriteria
2020	1.094.536.000,00	1.094.881.000,00	99,96%	Ekonomis
2021	1.069.599.000,00	1.096.677.000,00	97,53%	Ekonomis
2022	1.032.273.510,00	1.032.363.510,00	99,99%	Ekonomis

Sumber: APB Desa Pattalassang, Diolah,2023

Laporan Keuangan ADD pada kantor Desa Pattalassang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menunjukkan bahwa pada tahun 2020 realisasi biaya sebesar Rp.1.094.536.000,00. Untuk tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp. 1.069.599.000,00. dan pada tahun 2022 kembali mengalami penurunan realisasi biaya sebesar Rp.1.032.273.510,00.

Anggaran biaya pada Desa Pattalassang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada tahun 2020 sebesar Rp. 1.094.881.000,00. Untuk tahun 2021 mengalami penurunan senilai Rp. 1.096.677.000,00. dan pada tahun 2022 anggaran biaya Kembali mengalami penurunan sebesar Rp. 1.032.363.510,00.

Dilihat pada tabel 5.8 pada Rasio Ekonomis kinerja Keuangan Kantor Desa Pattalassang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang di ukur selama 3 tahun dimana, pada rasio ekonomis di tahun 2020 senilai 99,96% yang tergolong ke dalam kategori ekonomis disebabkan berada diantara 100%, di tahun 2021 terjadi penurunan senilai 97,53% yang berkategori ekonomis, kemudian di tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 99,99% yang termasuk kategori ekonomis.

uraian serta hasil perhitungan diatas Rasio Ekonomis Kinerja Keuangan Desa Pattalassang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan rata-rata Ekonomis keuangan Desa Pattalassang diatas 90% yaitu sebesar 99,16% dengan kriteria Kinerja Keuangan Ekonomis, Rasio ekonomis pada Desa Pattalassang untuk tahun 2020 sampai dengan 2022 mengalami perubahan. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan dalam pengeluaran desa setiap tahunnya. Realisasi belanja dana desa dapat dibandingkan dengan tujuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa Pattalassang yang harus dicapai dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan analisis rasio ekonomi.

Rasio Ekonomis merupakan rasio keuangan yang juga mencakup pengelolaan yang cermat, efisiensi dan sedikit pemborosan. Kinerja keuangan akan meningkat seiring dengan kehadiran ekonomi yang kuat. (Mahsun,2016)

d. Rasio Pertumbuhan

Rasio Pertumbuhan Pendapatan ADD Kantor Desa Pattalassang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2020-2022

Tahun	Realisasi Pendapatan Xn	Realisasi Pendapatan Xn-1	Rasio Pertumbuhan Pendapatan	Kriteria
2020	1.094.881.000,00	1.206.100.000,00	-9,22%	Rendah
2021	1.095.634.000,00	1.094.881.000,00	0,68%	Rendah
2022	1.005.983.510,00	1.095.634.000,00	-8,18%	Rendah

Sumber: APB Desa Pattalassang diolah, 2023

Laporan Keuangan ADD Kantor Desa Pattalassang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memperlihatkan bahwa realisasi pendapatan (ADD) mengalami peningkatan serta penurunan dimulai dari tahun 2020 s/d tahun 2022. Di tahun 2020 realisasi pendapatan Alokasi dana Desa senilai Rp. 1.094.881.000,00 dan pada tahun 2021 naik menjadi Rp. 1.095.634.000,00. Pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi sebesar Rp. 1.005.983.510,00.

Rasio Pertumbuhan Pendapatan Keuangan (ADD) pada Kantor Desa Pattalassang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebesar -9,22% pada tahun 2020, naik senilai 0,68% pada tahun 2021, dan kembali meningkat menjadi -8,18% pada tahun 2022, menurut data Perhitungan Rasio Pertumbuhan.

Tabel diatas menunjukkan peningkatan pendapatan positif dan negatif pada Kantor Desa Pattalassang, Pangkajene dan Kabupaten Kepulauan untuk (ADD). Pertumbuhan Pendapatan ADD berada pada titik terendah pada tahun 2020 (-9,22%) dan meningkat sebesar 0,68% pada tahun 2021, kembali menurun sebesar (-8,18%) pada tahun 2022.

Rasio Pertumbuhan Belanja ADD Pada Kantor Desa Pattalassang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2020-2022

Tahun	Realisasi Belanja ADD (Rp.) Xn	Realisasi Belanja ADD (Rp.) Xn-1	Rasio Pertumbuhan Belanja ADD (%)	Kriteria
2020	1.094.536.000,00	1.216.100.000,00	-9,10%	Rendah
2021	1.069.599.000,00	1.094.536.000,00	- 2,27%	Rendah
2022	1.032.273.510,00	1.069.599.000,00	- 3,48%	Rendah

Sumber : APB Desa Pattalassang, Diolah 2023

Realisasi Belanja (ADD) terjadi fluktuasi sejak tahun 2020, berdasarkan Laporan Keuangan ADD Kantor Desa Pattalassang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan s/d tahun 2022. Pada tahun 2020 Realisasi pengeluaran/Belanja ADD senilai Rp. 1.094.536.000,00 dan di tahun 2021 turun menjadi Rp. 1.069.599.000,00. Pada tahun 2022 kembali mengalami penurunan menjadi senilai Rp. 1.032.273.510,00.

Perhitungan Rasio Pertumbuhan Keuangan (ADD) pada Kantor Desa Pattalassang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebesar -9,10% pada tahun 2020, tumbuh senilai -2,27% pada tahun 2021 dan kembali turun senilai -3,48% pada tahun 2022.

Belanja ADD pada Kantor Desa Pattalassang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memperlihatkan pertumbuhan yang Negativ seperti terlihat pada Tabel 5.4. Kenaikan belanja alokasi dana desa terendah di tahun 2020 senilai -9,10%, namun di tahun 2021 tumbuh kearah positif yaitu meningkat sebesar -2,27%. Pada tahun 2022 kembali turun sebesar -3,48%.

Kinerja keuangan ADD Kantor Desa Pattalassang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan berada pada posisi negatif pada tahun 2020 hingga tahun 2022 akibat rata-rata pertumbuhan (-5,57%), sesuai uraian dan temuan perhitungan di desa. indeks pertumbuhan pendapatan (ADD). Kekuatan pemerintah desa dalam menaikkan pendapatan Dana Desa ditunjukkan dengan Rasio Pertumbuhan Dana yang kurang baik.

Rasio Pertumbuhan Pendapatan di Desa Pattalassang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan selama Tahun 2020 s/d 2022 yang memperlihatkan kekuatan Pemerintah Desa Pattalassang dalam menaikkan penerimaan Dana Desa belum baik disebabkan nilai Rasio Pertumbuhan Pendapatan Masi di bawa 0% di tahun 2022. Hal ini memperlihatkan bahwa Kinerja Keuangan Desa Pattalassang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan belum berkategori baik dalam meningkatkan Pertumbuhan Pendapatan Alokasi Dana Desa yang di rencanakan.

Kantor Desa Pattalassang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan juga mengalami pertumbuhan negatif pada tahun 2020 hingga tahun 2022 dengan rata-rata pertumbuhan pengeluaran sebesar (-4,95%), sesuai hasil perhitungan Rasio Pertumbuhan Belanja ADD Kinerja Keuangan ADD. Akibatnya, Rasio Pertumbuhan Belanja Kantor Desa Pattalassang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan selama tahun 2020 hingga 2022 kurang baik. Artinya Kinerja Keuangan Desa Pattalassang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dilihat dari pengelolaan belanja Desa belum dikatakan baik, disebabkan tidak memperlihatkan adanya Kenaikan Belanja Dana Desa setiap tahun.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diberikan dan temuan penelitian, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut mengenai temuan penelitian:

1. Rasio Efektivitas Alokasi Dana Desa Tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 menunjukkan Desa Pattalassang Kabupaten Pangkajene mempunyai kinerja keuangan yang positif. Karena telah mencapai 100%, hal ini menunjukkan efektivitas kapasitas pemerintah Desa Pattalassang dalam memenuhi tujuan dana Desa. Secara spesifik, angka tersebut yaitu 100% pada tahun 2020, 99,93% lebih rendah pada tahun 2021, dan 100% lebih tinggi pada tahun 2022.
2. Kinerja keuangan pemerintah desa Pattalassang di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mempunyai tingkat pertumbuhan negatif yang diukur dengan rasio pertumbuhan pendapatan. Jika dibandingkan dengan Pertumbuhan Belanja yang mempunyai rata-rata Rasio Pertumbuhan Belanja sebesar (-4,95), maka rata-rata Rasio Pertumbuhan (ADD) pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 senilai (-5,57%). Rasio Pertumbuhan Pendapatan ADD dirinci sebagai berikut: masing-masing senilai (-8,18%), (0,68%), dan (-9,22%) dari tahun 2020, 2021, dan 2022. Informasi tentang Rasio Pertumbuhan Belanja ADD sebagai berikut : tahun 2020 senilai (-9,10%), tahun 2021 senilai (-2,27%) dan tahun 2022 senilai (-3,48%).
3. Kinerja Keuangan pemerintah Desa Pattalassang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan di tinjau dari Rasio Efisiensi dikategorikan kurang Efisien, disebabkan rata-rata efisiensinya

dari tahun 2020 s/d 2022 diatas 90% yaitu sebesar 99,28%. Dengan rincian sebagai berikut: tahun 2020 senilai 99,96%, tahun 2021 sebesar 97,62% dan tahun 2022 senilai 102,61%. Realisasi nilai pengeluaran yang tidak sebanding dengan realisasi pendapatan menyebabkan rasio efisiensi ini masuk dalam kelompok kurang efisien. sedemikian rupa sehingga jumlah yang diakui untuk pengeluaran keuangan desa melebihi jumlah realisasi yang diperoleh.

4. Kinerja Keuangan pemerintah Desa Pattalassang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan di tinjau dari Rasio Ekonomis dikategorikan Ekonomis, karena rata-rata Rasio Ekonomisnya diatas 90% yaitu senilai 99,16% dengan rincian sebagai berikut: tahun 2020 senilai 99,96%, tahun 2021 senilai 97,53% dan pada tahun 2022 sebesar 99,99%.

Saran

Berikut adalah beberapa rekomendasi yang dapat dibuat berdasarkan temuan penelitian:

1. Berdasarkan kesimpulan di atas, sebaiknya pemerintah Desa Pattalassang berkonsentrasi pada peningkatan kinerja keuangannya dengan menggunakan acuan rasio ekonomi dan efisiensi, guna mencapai pengelolaan dan pertumbuhan dana desa yang lebih ekonomis, efisien, dan efektif pada tahun anggaran mendatang. Hal ini akan membantu meminimalkan sisa anggaran dan memaksimalkan realisasi anggaran belanja.
2. Untuk melakukan penelitian lebih lanjut, Peneliti berikutnya bisa melaksanakan penelitian yang serupa di desa-desa lain di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan menerapkan teknik kuantitatif untuk menganalisis temuannya. untuk mempelajari bagaimana setiap rasio keuangan mempengaruhi kesehatan keuangan daerah.
3. Untuk memperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai kinerja keuangan pemerintah desa, peneliti dapat memperpanjang periode penelitian menjadi 5–10 tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwi Supriati. (2021). *Analisis kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Rasio efektivitas dan Rasio Pertumbuhan Pada Desa Sumber Sari Kecamatan Tapung Hulu Kabupateng Kampar*.
- Farida, dkk, (2018) “Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang”, *Jurnal Akademi Akuntansi* Vol. 1, No. 1(2018), h. 64–73, <https://doi.org/10.22219/jaa.v1i1.6939>.
- Harahap, H. F. (2020). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah. Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(1), 34. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i1.87>
- Hery, SE., M.Si., CRP., RSA. 2018. *Analisis Kinerja Manajemen*. Jakarta: PT Grasindo.
- Irham Fahmi. (2018). *Manajemen Kinerja Teori dan Aplikasi*. Cv Afabeta: Bandung.
- Kasmir. (2013). *Pengantar Manajemen Keuangan*. Kencana: Jakarta.
- Kristina Korniti Kila, “Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur”, *Ejournal Administrasi Negara* Vol. 3, No. 4(2014), h. 505–519.
- Mahmudi, (2015), *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, Yogyakarta

- Mahsun. (2016). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta:
- Ode, L., Manan, A., Djauhar, A., Efektivitas, R., & Pertumbuhan, R. (2020). *Analisis Kinerja Keuangan Alokasi Dana Desa Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe*. 8–19.
- PERBU Pangkajene dan Kepulauan No. 4 tahun 2019 *Tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian alokasi dana desa setiap desa kabupaten pangkajene dan kepulauan tahun anggaran 2019*
- Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No.113 Tahun 2014 *Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Rahmat.(2022). *Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Maregam Kecamatan Tidore Selatan Kota Tidore Kepulauan Pada Masa Pandemi Covid-19*. *Jurnal Manajemen dan Ekonomi Bisnis Vol.2, No.4*
- Ropa, M. O. (2016). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan*. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(2), 738–747.
- Saragi, Z. A. (2022). *Analisis pengelolaan dana desa dalam mengukur kinerja keuangan pada desa bandar klippa kecamatan percut sei tuan kabupaten deli serdang*. *Skripsi*, 125.
- Sartika, N., & Pratama, A. I. (2019). *Analisis Rasio Keuangan Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2012 - 2016*. *Moneter - Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 6(2), 179–188. <https://doi.org/10.31294/moneter.v6i2.6494>
- Saputra, I Wayan. 2016. *Efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Lembean Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli 2009-2014*. *Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi (JJPE)*. Vol.6 No.1 Tahun 2016.
- Sulham. (2022). *Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pada Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang*. *UM Sumatra Utara, Medan 2022*
- Utomo, M. A. S. (2015). *Analisis penggunaan ratio : kemandirian, efektivitas, efisiensi, aktivitas dan pertumbuhan sebagai alternatif pengukuran kinerja keuangan pada pemda DKI Jakarta*. *Jraa*, 2(3), 15–52.